



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

**LAPORAN KINERJA
INSPEKTORAT KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2016**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat Nya dengan berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran 2016, yang merupakan tahun ke-empat dari lima tahun Rencana Strategik Inspektorat Kota Balikpapan dan Rencana Strategik Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2011 – 2016. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Inspektorat Kota Balikpapan memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan laporan ini sebagai sarana untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kota Balikpapan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Laporan kinerja ini diharapkan akan bermanfaat dalam memberikan masukan guna penyempurnaan penyusunan rencana kerja tahun mendatang dengan memperhatikan kekurangan-kekurangan yang ada.

Selama tahun anggaran 2016, Inspektorat Kota Balikpapan sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah telah melaksanakan berbagai kegiatan yang bersifat administratif, koordinatif, analisis kebijakan serta kegiatan pelaksanaan reviu laporan keuangan daerah dan evaluasi kinerja atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan ini disusun berdasarkan kegiatan yang dilakukan pada Sekretariat Inspektorat yakni Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi referensi umum bagi semua pihak dalam menyempurnakan



dokumen perencanaan periode yang akan datang. Disamping itu Laporan Kinerja dapat dimanfaatkan untuk penyempurnaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan pada waktu yang akan datang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Balikpapan, Januari 2017

**INSPEKTUR KOTA BALIKPAPAN**

H. DAHNIAR, S.E., M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19631111 198511 2 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
B. REALISASI ANGGARAN

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA UTAMA ;
2. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2016;
3. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016;
4. SURAT PERNYATAAN/PERJANJIAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemerintah Kota Balikpapan menetapkan visi mewujudkan Balikpapan sebagai kota industri, perdagangan, jasa dan pariwisata yang didukung oleh penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) dan masyarakat yang beriman, sejahtera, religius dan berperadaban maju (madinatul Iman) untuk periode 2011-2016.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Balikpapan disampaikan bahwa ruang lingkup objek tugas dan fungsi Inspektorat adalah pengawasan dan pembinaan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta berperan penting dalam mendukung percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan yang mempunyai visi “Mewujudkan Kota Balikpapan nyaman dihuni menuju Madinatul Iman”, sedangkan misinya adalah “Meningkatkan ketertiban umum, penegakan hukum, pemberantasan KKN dan penanganan masalah sosial” serta “Melaksanakan reformasi birokrasi”.

Dalam pencapaian misi memerlukan kajian perencanaan yang komprehensif dengan memperhitungkan secara kualitatif dan kuantitatif dari Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat Kota Balikpapan serta faktor pendanaan kegiatan, sarana/prasarana kantor yang memadai dan sumber daya non APIP yang bertugas di bidang kesekretariatan.

Sasaran Inspektorat Kota Balikpapan yang akan dicapai pada tahun 2012-2016 adalah: 1) Meningkatnya kapasitas APIP yang profesional dan kompeten; 2) Meningkatnya kemampuan Aparatur Inspektorat yang memadai dalam menunjang tugas pokok pengawasan; 3) Meningkatnya



kesadaran hukum atas peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan SKPD dan 4) Meningkatnya kinerja SKPD terkait pelayanan masyarakat.

Untuk mencapai sasaran tersebut Inspektorat Kota Balikpapan menetapkan 15 Indikator Kinerja Utama : 1) Jumlah APIP yang mengikuti sertifikasi Jabatan Fungsional; 2) Jumlah Aparatur Inspektorat yang mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan penunjang tugas pokok pengawasan; 3) Jumlah Pemeriksaan Khusus/Kasus; 4) Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan; 5) Jumlah Obyek Pengawasan; 6) Persentase pelaporan LP2P; 7) Persentase penyampaian LHKPN; 8) Persentase penandatanganan Pakta Integritas; 9) Persentase pelaporan penerimaan gratifikasi; 10) Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai dengan SAP dan SPI memadai; 11) Persentase SKPD yang melaksanakan konsultasi penyelenggaraan pemerintah daerah; 12) Persentase pelaksanaan sosialisai pengelolaan aset dan keuangan daerah; 13) Persentase SKPD yang melaksanakan SPIP; 14) Persentase LAKIP SKPD yang dievaluasi dan 15) Persentase SKPD yang telah menyelesaikan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Jika dilihat dari penggunaan anggaran, pada tahun 2016 realisasi keuangan mencapai Rp.4.079.178.106,33 yaitu sebesar 91,82% dari total anggaran yang diperoleh. Secara keseluruhan realisasi fisik kegiatan telah terlaksana 100%.

Keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan secara umum didukung oleh sumberdaya yang ada terutama sumberdaya manusia. Beberapa hal yang tidak dapat dicapai dipengaruhi oleh beberapa kendala diantaranya keterlambatan pelaksanaan kegiatan terkait dengan birokrasi dan koordinasi dengan SKPD lain ataupun dengan daerah lain, permasalahan lainnya adalah kurang tersedianya sumber daya manusia (SDM).

Pada LAKIP Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2016 dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan kegiatan Tahun 2016 dapat



berhasil dengan baik. Untuk pencapaian sasaran Tahun 2016 dari 4 sasaran yang telah ditetapkan, semuanya telah dapat tercapai dengan baik, walaupun terdapat beberapa indikator sasaran yang belum dapat tercapai sesuai targetnya, ketidakberhasilan pencapaian indikator sasaran sangat tergantung dari tingkat peran aktif SKPD yang terkait dalam menyikapi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.

Untuk mengatasi kendala tersebut dibutuhkan motivasi yang tinggi dan kerja keras dari seluruh aparat Inspektorat Kota Balikpapan untuk dapat meningkatkan capaian kinerjanya di masa mendatang. Selain itu dukungan dari masyarakat dan Pemerintah Kota Balikpapan serta instansi terkait juga sangat berperan penting dalam pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Balikpapan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat meningkatkan peran bagi Inspektorat Kota Balikpapan untuk mendukung terciptanya "Good Governance" atau Kepemerintahan yang Baik, yang akhirnya bermuara pada terlaksananya pelayanan prima kepada masyarakat.



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kota Balikpapan ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi, misi serta program Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2016

Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Balikpapan dalam rangka mewujudkan *good Governance*, transparansi dan akuntabel sekaligus sebagai alat kendali pemacu peningkatan kinerja unit organisasi di lingkungan Inspektorat Kota Balikpapan.

Inspektorat Kota Balikpapan dalam menjalankan tugas dan fungsi berpedoman pada beberapa peraturan antara lain berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 18 tanggal 27 Oktober tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah dimana Inspektorat Kota Balikpapan merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan



bertanggungjawab kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Kota Balikpapan menyelenggarakan fungsi sesuai Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 34 Tahun 2009 tentang uraian tugas dan fungsi Inspektur Kota Balikpapan.

Program Kerja Pengawasan Tahunan yang dilaksanakan oleh Inspektorat sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016, yaitu :

A. Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja;
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
4. Reviu Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
5. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja;
6. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja;
7. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
8. Pembinaan dan pengawasan terpadu dengan Inspektorat Kementerian/Provinsi/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau BPKP;
9. Pengarusutamaan gender;
10. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi.

B. Kegiatan Pembinaan dan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government*, dan pelayanan publik pada pemerintahan kabupaten/kota :

1. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan :



- a. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - b. Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap triwulan);
 - c. Pembangunan zona integritas;
 - d. Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
2. Pemantauan pelaksanaan Perpres 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya;
 3. Pengawasan atas Pengelolaan Anggaran Pendidikan;
 4. Penguatan Sistem Pengendalian Internal;
 5. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
 6. Pemantauan perkembangan indikator kinerja;
 7. Evaluasi perkembangan kinerja periodik (setiap triwulan).
- C. Kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan
1. Penyusunan petunjuk teknis di bidang pengawasan;
 2. Koordinasi pembinaan dan pengawasan;
 3. Tugas lain sesuai kebijakan Walikota antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategis di lingkup daerah.

ASPEK STRATEGIS

Inspektorat Kota Balikpapan merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam rangka akuntabilitas dan objektivitas hasil pengawasan, maka Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota, sedangkan kepada Sekretaris Daerah merupakan pertanggungjawaban administratif dalam hal keuangan dan kepegawaian. Sejalan dengan peranan Inspektorat Kota Balikpapan yang merupakan unsur pengawasan yang mempunyai tugas membantu Wali Kota dibidang pengawasan pemerintahan dan pembangunan serta memfasilitasi pelaksanaan pengawasan dilingkungan pemerintah Kota Balikpapan, Inspektorat juga berperan



penting dalam mendukung percepatan pemberantasan korupsi dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. maka konsekuensi logis dari penjelasan diatas diperkirakan menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Potensi objek tugas pengawasan reguler Inspektorat secara kuantitatif berbanding lurus dengan banyaknya Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;
2. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang ada di Inspektorat Kota Balikpapan dituntut memiliki pengetahuan/wawasan yang memadai dari masing-masing urusan tersebut agar peran *quality assurance* dapat terlaksana secara maksimal;
3. Inspektorat Kota Balikpapan mempunyai peran sentral dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel sehingga memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
4. Mengingat Inspektorat Kota Balikpapan sebagai institusi pengawasan internal pemerintah, maka pemberdayaan peran APIP agar dapat dimaksimalkan, sehingga mampu mendeteksi secara dini apabila terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, dan APIP mampu mengawal jalannya roda pemerintahan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Inspektorat Kota Balikpapan sebagai pendorong terlaksananya Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan melalui pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada unit kerja melalui upaya pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM;
6. Selain itu Inspektorat Kota Balikpapan juga mendukung penilaian panji-panji keberhasilan pembangunan, khususnya dibidang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur yang dilaksanakan setiap tahun.



BAB II
PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2016 berpedoman pada Permenpan No. 53 Tahun 2014. Adapun Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2016 sebagaimana tabel dibawah ini ;

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kapabilitas APIP yang Profesional dan Kompeten	Level Kapabilitas APIP	Level 2
2	Penurunan pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan	80%
		Cakupan Pengawasan yang akan dicapai	140 Obyek Pengawasan
		Persentase LK SKPD yang sesuai dengan SAP dan SPI memadai	95%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD yang dinilai Cukup/Baik	15 SKPD



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Berikut ini disajikan sasaran, program dan kegiatan serta capaian kinerja Inspektorat Kota Balikpapan untuk tahun anggaran 2016:

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2016

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya Kapabilitas APIP yang Profesional dan Kompeten	Level Kapabilitas APIP	Level 2	Level 2
Penurunan pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan	80%	84 %
	Cakupan Pengawasan yang akan dicapai	140 Obyek Pengawasan	182 Obyek Pemeriksaan
	Persentase LK SKPD yang sesuai dengan SAP dan SPI memadai	95%	100 %
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD yang dinilai Cukup/Baik	15 SKPD	19 SKPD

Keterangan : Atas 3 sasaran strategis dengan 5 indikator kinerja sebagai tolak ukur. Pada awal periode, Itkot Balikpapan memutuskan target



atas 5 indikator tersebut berdasarkan penambahan dan disajikan pula pada indikator kinerja utama maupun penetapan/perjanjian kinerja antar Inspektur dengan Walikota Balikpapan. Atas 5 target tersebut, realisasi pada akhir periode menggambarkan bahwa 1 target tercapai realisasinya, yaitu target persentase LK SKPD dan SPI memadai, sementara capaian 4 target dengan realisasi melampaui.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Tahun 2016 dengan Tahun 2015, 2014, 2013 dan 2012

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	2012		2013		2014		2015		2016	
		R	C	R	C	R	C	R	C	R	C
Meningkatnya kapabilitas APIP yang profesional dan kompeten	Jumlah APIP yang mengikuti sertifikasi Jabatan Fungsional	5	100%	11	110%	2	100%	-	-	-	-
	Level Kapabilitas APIP	-	-	-	-	-	-	Level 2	100%	Level 2	100%
Penurunan pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan	-	-	84%	95,45%	86%	87%	81,19%	85,46%	84%	105%
	Cakupan pengawasan yang akan dicapai	151	100,6%	157	98%	247	154,38%	158	98,75%	182	130%
	Persentase LK SKPD yang sesuai dengan SAP dan SPI memadai	-	-	100%	100%	90%	100%	100%	100%	100%	105,26%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Persentase LAKIP SKPD yang dievaluasi (kecuali Setdakot, DKK, Disdik)	-	-	54,38%	100	96%	128	-	-	-	-
	Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD yang dinilai Baik/Cukup	-	-	-	-	-	-	21 SKPD	140%	19 SKPD	126,67%

Keterangan : a. Sasaran 1 pada tahun 2012 s/d 2015 terdapat 1 indikator, namun pada periode Tahun Anggaran 2015 – 2016 bertambah 1 indikator kinerja yang berorientasi outcome, sehingga capaian kinerja 100%.

b. Sasaran 2 pada tahun 2012 terdapat 1 indikator saja, namun Tahun Anggaran 2013 s/d 2016 terdapat 3 indikator kinerja berorientasi outcome, ketiga indikator kinerja dengan realisasi melampaui target maka capaian kerjanya melebihi 100%.



- c. Sasaran ke-3 tahun 2013 s/d 2014 terdapat 1 indikator kinerja, akan tetapi berubah pada tahun 2015 – 2016 indikatornya, dan realisasinya melampaui target maka capaian kinerjanya melebihi 100%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Renstra

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	2012		2013		2014		2015		2016	
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Meningkatnya kapabilitas APIP yang profesional dan kompeten	Jumlah APIP yang mengikuti sertifikasi Jabatan Fungsional	12	5	10	11	2	2	-	-	-	-
	Level Kapabilitas APIP	-	-	-	-	-	-	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2
Penurunan pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan	50-	-	88%	84%	90%	86%	95%	81,19%	80%	84%
	Cakupan pengawasan yang akan dicapai	160	151	160	157	160	247	160	158	140	182
	Persentase LK SKPD yang sesuai dengan SAP dan SPI memadai	50	-	80	100	90	90	95	95%	95%	100%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Persentase LAKIP SKPD yang dievaluasi (kecuali Setdakot, DKK, Disdik)	36	-	50	54,38%	75	96%	-	-	-	-
	Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD yang dinilai Baik/Cukup	-	-	-	-	-	-	15 SKPD	21 SKPD	15 SKPD	19 SKPD

- Keterangan :
- Sasaran 1 pada tahun 2012-2015 2 indikator kinerja, namun pada periode Tahun Anggaran 2016 hanya 1 indikator kinerja dengan realisasi sama dengan target.
 - Sasaran 2 pada tahun 2012-2015 3 indikator kinerja, namun pada periode Tahun Anggaran 2016 masih 3 indikator kinerja dengan realisasi melebihi target.
 - Sasaran 3 pada tahun 2012-2015 2 indikator kinerja, namun pada periode Tahun Anggaran 2016 hanya 1 indikator kinerja dengan realisasi melebihi target.



4. Perbandingan dengan Standar Nasional

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional
Meningkatnya Kapabilitas APIP yang Profesional dan Kompeten	Level Kapabilitas APIP	Level 2	Data BPKP menunjukkan dari 474 APIP seluruh Indonesia - Level 1 : 404 - Level 2 : 69 - Level 3 : 1
Penurunan pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan	84%	Balikpapan adalah yang tertinggi dari 10 kabupaten/kota se-provinsi Kalimantan Timur untuk Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI
	Cakupan Pengawasan yang akan dicapai	182 Obyek Pengawasan	-
	Persentase LK SKPD yang sesuai dengan SAP dan SPI memadai	100%	Balikpapan salah satu daerah penerima Opini WTP dari BPK-RI (Opini tertinggi)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD yang dinilai Cukup/Baik	19 SKPD	-

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

a. Sasaran Meningkatkan Kapabilitas APIP yang Profesional dan Kompeten

Indikator Kinerja utama	2016		Capaian
	Target	Realisasi	%
Level Kapabilitas APIP	Level 2	Level 2	100

Hasil capaian kinerja dari Sasaran **Meningkatnya Kapasitas APIP yang Profesional dan Kompeten** dengan Indikator Kinerja **Level Kapabilitas APIP**, realisasi target menunjukkan level 2. Adapun target yang ditetapkan pada awal tahun 2016 adalah tercapainya



level 2 yaitu penilaian dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas Kapabilitas APIP terkait enam proses yang selanjutnya disebut elemen yaitu:

- peran layanan APIP berupa Audit Ketaatan,
- Pengelolaan SDM berupa Pengembangan profesi individu serta identifikasi dan rekrutmen SDM yang kompeten,
- praktek profesional berupa perencanaan pengawasan berdasarkan prioritas manajemen/pemangku kepentingan serta kerangka kerja praktek professional dan prosesnya.
- Akuntabilitas dan manajemen kinerja berupa anggaran operasional kegiatan APIP serta perencanaan kegiatan APIP,
- Budaya dan hubungan organisasi berupa pengelolaan organisasi APIP,
- struktur tata kelola berupa akses penuh terhadap informasi organisasi aset dan SDM.

Simpulan : realisasi yang tercapai sesuai dengan yang ditargetkan untuk mengukur sasaran strategis.

Langkah kedepan : Dengan terpenuhinya level 2 atas kapabilitas APIP merupakan tantangan kedepan untuk meningkatkan level yang lebih tinggi (level 3) dengan peran dan layanan APIP sebagai layanan konsultasi dan melaksanakan audit kinerja/program evaluasi yang telah dimulai dengan adanya Klinik APBD di Inspektorat Kota Balikpapan.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Meningkatnya kapabilitas APIP yang profesional dan kompeten	Level Kapabilitas APIP	Level 2	Level 2	100	0,00	0,00	0,00



Atas sasaran dimaksud, indikator kinerja diukur dari penilaian BPKP atas kinerja organisasi APIP untuk mengukur kapabilitasnya yang profesional dan kompeten. Tidak ada alokasi anggaran atas pencapaian sasaran Meningkatkan Kapabilitas APIP yang Profesional dan Kompeten.

b. Sasaran Strategis Penurunan pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Indikator Kinerja utama	2016		Capain
	Target	Realisasi	%
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan	80%	84%	105
Cakupan Pengawasan yang akan dicapai	140 Obyek Pengawasan	182 Obyek Pengawasan	130
Persentase LK SKPD yang sesuai dengan SAP dan SPI memadai	95%	100%	105,26

Hasil capaian kinerja dari Sasaran Strategis Penurunan pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dengan indikator sebagai berikut :

- a) Indikator kinerja Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan, adapun target yang ditetapkan diawal tahun 2016 sebesar 80%, realisasi target menunjukkan angka 84% yang diperoleh dari hasil pemeriksaan/pengawasan APIP Inspektorat Kota Balikpapan berdasarkan PKPT dan Non PKPT dengan jumlah temuan yang telah selesai ditindaklanjuti auditi sebanyak 404 rekomendasi atau 72.53% dari 557 rekomendasi. Dan realisasi yang diperoleh dari hasil pemeriksaan eksternal dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) sebanyak 584 rekomendasi atau 94,96% dari 615 rekomendasi, dimana tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI yang merupakan temuan sejak tahun 2004



sampai dengan tahun 2016 (pemutakhiran data di BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur pada bulan Juni dan Desember), 15 rekomendasi masih dalam proses dan 3 rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. Penyelesaian tindak lanjut ini adalah yang tertinggi dari 10 kabupaten/kota se-provinsi Kalimantan Timur.

Simpulan :

- TL atas temuan BPK-RI (2004 – 2016) : 94,96% (584. TL dari 615 rekomendasi)
- TL atas Temuan APIP : 72,53 % (404 TL dari 557. Rekomendasi)
- Penyelesaian tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI ini adalah yang tertinggi dari 10 kabupaten/kota se-provinsi Kalimantan Timur.

Hambatan : kurangnya tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan APIP Inspektorat Kota Balikpapan adalah lemahnya kesadaran SKPD/Auditi untuk melaksanakan tindak lanjut.

Langkah kedepan (Tindak Lanjut Temuan BPK) : mempertahankan kondisi berupa percepatan dan pendampingan tindak lanjut atas temuan BPK-RI.

Langka-langkah yang diambil (Tindak Lanjut Temuan APIP) : bahwa di periode mendatang lebih mengoptimalka rapat koordinasi pengawasan daerah tingkat kota dan percepatan tindak lanjut pada masa pemeriksaan/pengawasan.

- b) Indikator kinerja cakupan pengawasan yang akan dicapai, capaian target menunjukkan angka 130%. Adapun target yang ditetapkan diawal tahun 2016 berjumlah 140 obrik, sedangkan realisasi yang dapat dicapai sebesar 182 obrik dari 76 SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan yang sesuai dengan PKPT tahun 2016 terdiri dari pemeriksaan reguler berjumlah 93 obrik, pemeriksaan



barang/jasa berjumlah 12 obrik, pemeriksaan tujuan tertentu berjumlah 13 obrik, dan Evaluasi berjumlah 63 obrik (Evaluasi Lakip, Evaluasi SPGRM, Evaluasi BLUD) serta 1 Reviu Laporan Keuangan Daerah. Jika dibandingkan tahun 2015 realisasi jumlah obyek pengawasan sebesar 157 obrik, terdapat peningkatan jumlah obrik sebesar 31,25%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2016 Tim Pemeriksaan/Pengawasan Inspektorat Kota Balikpapan melakukan Evaluasi SPGRM Kelurahan se-Kota Balikpapan. Langkah-langkah yang diambil di periode mendatang adalah optimalisasi Hari Pemeriksaan.

Simpulan : realisasi yang tercapai telah melampaui target yang ditetapkan.

- c) Indikator kinerja persentase LK SKPD yang sesuai dengan SAP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dan SPI memadai, adapun target yang ditetapkan awal tahun 2016 sebesar 95% sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 100%, dimana hasil asistensi penyusunan laporan keuangan SKPD menunjukkan bahwa SAP dan SPI telah memadai, Laporan keuangan SKPD mempengaruhi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah hasil pemeriksaan BPK atas LKPD 2016 mendapat penilaian terbaik dari BPK dengan opini WTP.

Simpulan : dengan diperolehnya opini WTP dari BPK RI atas LK-Pemda, maka menunjukkan Laporan keuangan SKPD telah sesuai dengan SAP dan SPI memadai, LK-SKPD mempengaruhi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Langkah kedepan : mempertahankan penyajian Laporan Keuangan SKPD dalam upaya memperoleh Opini WTP dari BPK-RI di periode mendatang.



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
2.	Penurunan pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan	80%	84%	105	492.890.000,00	464.376.046,00	94,00
		Cakupan Pengawasan yang akan dicapai	140	182	130	838.370.000,00	813.810.750,00	97,00
		Persentase LK SKPD yang sesuai dengan SAP dan SPI memadai	95%	100%	105,26	30.935.000,00	17.695.000,00	57,00

Dari tabel diatas diketahui bahwa dalam rangka mencapai sasaran dimaksud diperlukan pencapaian atas indikator – indikator kinerja dengan **kebutuhan anggaran** antara lain :

- 1) Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan, anggaran dibutuhkan antara lain untuk : Belanja Pegawai (Honorarium Kepanitiaan Rakoowasda), Belanja Barang Jasa (Belanja ATK dan barang pakai habis, Belanja jasa, Belanja Perjalanan Dinas).
- 2) Cakupan Pengawasan yang akan dicapai, anggaran dibutuhkan antara lain untuk : Belanja Pegawai (Honorarium Pengelola Kegiatan), Belanja Barang Jasa (Belanja ATK dan barang pakai habis, Belanja jasa, Belanja Perjalanan Dinas).
- 3) Persentase LK SKPD yang sesuai dengan SAP dan SPI memadai, Cakupan Pengawasan yang akan dicapai : anggaran dibutuhkan antara lain untuk : Belanja Pegawai (Honorarium Pengelola Kegiatan), Belanja Barang Jasa (Belanja ATK dan barang pakai habis, Belanja jasa, Belanja Perjalanan Dinas).



c. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator Kinerja utama	2016		Capain 2016
	Target	Realisasi	%
Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD yang dinilai cukup/baik	15 SKPD	19 SKPD	126,67%

Hasil capaian kinerja dari **Sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah** dengan indikator sebagai berikut :

- a. Indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD yang dinilai cukup/baik, adapun target yang ditetapkan awal tahun 2016 adalah 15 SKPD sedangkan realisasi 19 SKPD nilai baik "B" yaitu : 1. DPKP 69,98 % 2. BKD 69,06 % 3. BPMP2T 68,58 % 4. DISDIK 67,51 % 5. DKPP 65,82 % 6. DISDUKCAPIL 64,51 %. Dan 13 SKPD nilainya cukup (memadai) "CC", 1. DTKP 59,86% 2. DISPENDA 59,74% 3. ITKOT 58,40% 4. BLH 58,11% 5. DPOKP 55,34% 6. DISPERINDAGKOP 53,64% 7. Kantor ARSIP 53,53% 8. KECAMATAN SELATAN 51,89% 9. KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA 51,70% 10. BPMP2KB 51,36% 11. SATPOL PP 50,56% 12. DISNAKERSOS 50,32% 13. DISHUB 50,28%. Realisasi tersebut diperoleh dari Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD Tahun Anggaran 2015 dari Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kota Balikpapan yang telah dilaksanakan, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya ada penurunan realisasi, dikarenakan hasil evaluasi SAKIP tahun 2016 SKPD dengan nilai baik "B" yang nilainya > 60 –



70 atau nilai cukup (memadai) "CC" yang nilainya > 50 - 60. 1Laporan Hasil Evaluasi disampaikan kepada Kepala SKPD terkait dengan Tembusan kepada Walikota Balikpapan.

Simpulan : Capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD yang dinilai cukup/baik	15 SKPD	19 SKPD	126,67	47.020.000,00	40.400.000	86,00

Dari tabel diatas diketahui bahwa dalam rangka mencapai sasaran dimaksud diperlukan pencapaian atas indikator kinerja dengan **kebutuhan anggaran** untuk : Belanja Barang Jasa (Belanja ATK dan barang pakai habis, Belanja jasa, Belanja Perjalanan Dinas).

d. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas Keuangan sangat penting dalam rangka untuk mewujudkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Selama tahun 2016 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Inspektorat Kota Balikpapan, dianggarkan melalui APBD Kota Balikpapan. Total Anggaran Inspektorat Kota Balikpapan adalah sebesar Rp. 11.066.638.510,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 10.410.639.000,33 atau dengan serapan dana APBD mencapai 94,07%, maka dengan demikian terdapat silpa sebesar Rp. 655.999.433,67 hal ini merupakan penghematan penggunaan anggaran.

Anggaran Belanja Inspektorat Kota Balikpapan adalah sebesar Rp11.066.638.510,00 terdiri dari :

1. Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.624.117.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 6.331.460.970 (95,58%)
2. Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 4.442.521.510,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.079.178.106,33 (91,82%) yang terbagi atas :



- 1) Anggaran pelaksanaan 4 (empat) program yang bersifat umum dipergunakan untuk mendukung pencapaian sasaran organisasi sebesar Rp. 1.969.917.650,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.705.887.460,00 atau 86,60%;
- 2) Anggaran pelaksanaan 4 (empat) program yang bersifat teknis yang dipergunakan untuk pencapaian 3 (tiga) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sebesar Rp. 2.472.603.860,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.373.290.646,33 atau 95,98%.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja setiap sasaran pada Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2016 dapat dilihat di tabel berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Meningkatnya kapabilitas APIP yang profesional dan kompeten	Level Kapabilitas APIP	Level 2	Level 2	100	0,00	0,00	0,00
2.	Penurunan pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Presentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan	80%	84	105	731.277.650,00	468.963.180,00	64,13
		Jumlah Objek Pengawasan	140	182	130	1.316.450.000,00	1.019.477.900,00	77,44
		Presentase LK SKPD yang sesuai dengan SAP dan SPI memadai	95%	100%	105,26	81.050.000,00	55.793.200,00	68,84
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD yang dinilai cukup/baik	15 SKPD	19 SKPD	126,67	146.769.200,00	84.839.400	57,80

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kota Balikpapan pada tahun 2016. Adapun tingkat efisiensi terhadap aspek sumber daya manusia khususnya auditor sudah optimal dari jumlah APIP sebanyak 40 orang melakukan pemeriksaan obrik/auditi yang berjumlah 182 obyek pengawasan dalam setahun.



BAB IV
PENUTUP

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Inspektorat Kota Balikpapan disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2016, serta Penetapan Kinerja Tahun 2016. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari sasaran dan kegiatan secara umum telah dapat dicapai dengan baik.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan *Clean Government* yang melibatkan *Stakeholder* sehingga kedepan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Balikpapan, Februari 2017

INSPEKTUR KOTA BALIKPAPAN

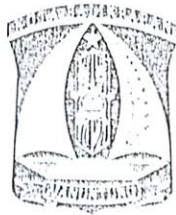


Hj. DAHNIAR, S.E., M.AP.

Pembina Utama Muda
NIP. 196311111985112003



LAMPIRAN - LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DAHNIAR**
Jabatan : **INSPEKTUR**
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. M. RIZAL EFFENDI**
Jabatan : **WALI KOTA BALIKPAPAN**
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua
H. M. RIZAL EFFENDI

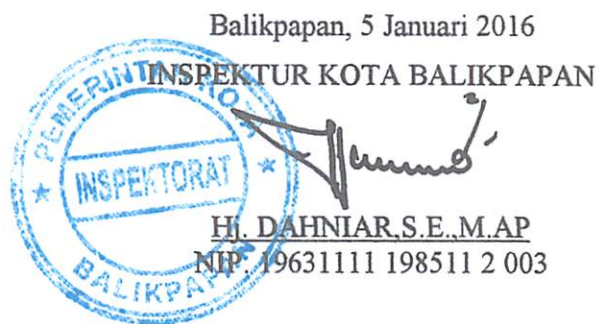
Balikpapan, 15 Januari 2016
Pihak Pertama

DAHNIAR

**PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2016
INSPEKTORAT KOTA BALIKPAPAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kapabilitas APIP yang Profesional dan Kompeten	Level Kapabilitas APIP	Level 2
2	Penurunan pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan	80%
		Cakupan pengawasan yang akan dicapai	140 Obyek Pengawasan
		Persentase LK SKPD yang sesuai dengan SAP dan SPI memadai	95%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD yang dinilai Baik/Cukup	15 SKPD

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDh	Rp 2.553.317.200,00	
2. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Rp 1.403.435.400,00	
3. Pembinaan Manajemen Pemerintahan Kota Balikpapan	Rp 67.200.000,00	
4. Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 320.099.740,00	



RENCANA KINERJA TAHUNAN SKPD

Unit SKPD : Inspektorat Kota Balikpapan

Tahun : 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kapabilitas APIP yang Profesional dan Kompeten	Level Kapabilitas APIP	Level 2
Penurunan pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan	80%
	Cakupan Pengawasan yang akan dicapai	140 Obyek Pengawasan
	Persentase LK SKPD yang sesuai dengan SAP dan SPI memadai	95%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai akuntabilitas kinerja SKPD yang dinilai Baik/Cukup	15 SKPD

INSPEKTUR KOTA BALIKPAPAN,



Hj. DAHNIAR, S.E., M.A.P.
NIP.19631111 198511 2 003

PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN 2016

Kota : Balikpapan
SKPD : Inspektorat Kota Balikpapan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)
(i)	1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kapabilitas APIP yang Profesioanl dan Kompeten	Level Kapabilitas APIP	Level 2	Level 2	100
2	Penurunan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan	80%	84%	105
		Cakupan Pengawasan yang akan dicapai	140 Obyek Pengawasan	182 Obyek Pengawasan	130
		Persentase LK SKPD yang sesuai dengan SAP dan SPI memadai	95%	100%	105,26
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD yang dinilai Baik/Cukup	15 SKPD	19 SKPD	126,67

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2016 : Rp 2.472.603.860,00
 Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016 : Rp 2.373.290.646,33

Balikpapan, 3 Januari 2017

INSPEKTUR KOTA BALIKPAPAN



Hj. DAHNIAR S.E., M.AP
 NIP. 19631111 198511 2 003

